

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Mervi Takalawangen¹
Michael Mantiri²
Donald Monintja³

Abstrak

Pemuda merupakan tongkat estafet untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung dan penerus masa depan ini. Tidak dapat dipungkiri pemuda memiliki peran penting dalam setiap perubahan dan pembangunan kearah cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu peluang dalam setiap pembangunan bangsa dalam melakukan pemberdayaan kepada para pemuda. Pemberdayaan yang dilakukan kepada para pemuda sebagai salah satu kegiatan yang tidak diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa Indonesia ini dimasa yang akan datang. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda didesa Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam menyikapi masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh bersumber dari penelitian kuran lebih satu bulan dengan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda didesa sehingga pemuda merasa terabaikan dari pemerintah. Dengan dibentuknya karang Taruna pada bulan Februari mampu merangkul pemuda desa dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan yang ada didesa.

Kata kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemberdayaan terhadap pemuda merupakan salah satu langkah untuk membawa ke arah cita-cita bangsa, karena itu setiap pemuda baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan. Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai objek sekaligus subjek dan juga merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata bergantung pada indikator usia saja tetapi pemuda dalam pengertian yang lebih tepat atau lebih luas untuk menunjukkan kualitas dan semangat, peran pemuda pada masa ini selalu menempati posisi yang menentukan proses sosial politik, negara dan masyarakat.

Pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan sebaiknya sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda dapat mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna untuk menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Pemuda merupakan bagian dari masyarakat yang tak lepas dari permasalahan sosial. Masa muda adalah masa peralihan yang rawan akan pengaruh negatif, baik dalam (diri-sendiri) maupun dari luar (lingkungan).

Pemuda akan muda terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, menyenangkan sesaat namun berdampak buruk bagi dirinya. Tak sedikit mempunyai masalah tentang ekonomi (pengangguran) yaitu kemudian merembet keberbagai masalah lain krisis kepercayaan diri, pergaulan bebas, pengembangan minat, serta miras.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dan itu berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak karakter, kapasitas aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemberdayaan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah baik di pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, desa lesabe memiliki potensi desa atau hasil bumi pertanian dan perikanan Mata pencaharian penduduknya adalah petani. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lesabe sebesar

1.173.916.900. dengan program pemberdayaan masyarakat desa lesabe adalah:

- a. Peningkatan Pelayanan Sosial PKK
- b. Penguatan Kapasitas BUMDES dan MODAL
- c. Penguatan Kapasitas MTK
- d. Penguatan Kapasitas TPK
- e. Perkawinan Massal 10 pasang
- f. Kelompok Pengrajin Meubel

Menurut pengamatan penulis berkaitan dengan pemuda yang ada di desa Lesabe diliputi persoalan yang sangat kompleks, sebagian dari mereka tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki akses untuk pekerjaan dan sebagian terlibat dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi minuman keras dan kurangnya pemberian program oleh pemerintah terhadap pemuda yang fokusnya untuk mengembangkan potensi dari setiap pemuda.

Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tentang pemuda, pemerintah diwajibkan untuk memberdayakan pemuda untuk mencegah hal-hal demikian, dari sini penulis melihat peran pemerintah desa yang masih belum nampak. Padahal undang-undang dengan jelas mengamanatkan peran pemerintah itu harus nampak melalui strategi yang tepat yakni suatu pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda sendiri menurut Undang—Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 dan ayat 6 adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan pasal 13 menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemuda.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Secara etimologis, istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Menurut Edy Suhardono (2018:3) suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

Menurut soerjono soekanto, (2014: 210-211) berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur dalam norma-norma yang berlaku.

Perana lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) peranan meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soerjono Soekanto (2014; 211)

Menurut Maurice Duverger (2010: 103) berpendapat bahwa istilah peran dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor profesional.

Menurut Sondang P Siagian (2003;54) menyatakan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan.

Konsep Pemerintah

Secara etimologi istilah “pemerintah” (dalam buku Azmi Fendri 2016:25) berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa “pemerintah” adalah kekuasaan untuk memerintah suatu Negara atau badan yang tertinggi atau yang memerintah suatu Negara seperti kepala pemerintahan atau kabinet suatu pemerintahan.

Menurut Mariun (dalam Asmi Fendri 2016:26) istilah pemerintah merupakan kata yang menunjuk pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Jadi istilah pemerintah sebagai subjek atau organ/aparat yang menjalankan fungsi tertentu mempunyai arti sempit dan luas. Dalam arti luas, pemerintah adalah menunjuk kepada semua aparatur/alat perlengkapan Negara sebagai satu kesatuan yang menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menunjuk pada aparatur atau alat perlengkapan Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dalam arti sempit, yaitu yang diartikan sebagai tugas dan kewenangan Negara dalam bidang eksekutif saja.

Mustopadidjaja, (dalam Arifin Tahir 2015:121-122) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah, organisasi birokrasi dan prosedur tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara optimal sebagai mana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintahan agar prosedur ketatalaksanaan dan bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang akan dicapai.

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memrintah serta memiliki kewenangan dalam membuat hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Wilson (dalam buku DR. H Inu Kencana Syafie, M, Si 2017:33) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan

dengan organisasi kekuatan angkatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu lembaga atau badan public yang memiliki suatu tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordianasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemberdayaan berasal dari kata dasar "Daya" yang bearti kekuatan atau tenaga. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu, pemberdayaan merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mensejahterakan masing-masing individu. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau pemberdayaan).

Menurut Payne dalam Putra dan Pratana (2010:10) pemberdayaan adalah suatu proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, kemampuan, untuk mengambil keputusan dan tindakan termasuk mengurangi kendala pribadi dan social dalam mengambil keputusan tindakan tersebut.

Menurut Oos M. Anwas (2014:49) Pemberdayaan adalah

bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dang memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangka informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Pranarka dan Muljarto (dalam Oo M. Anwas 2014:50) Pemberdayaan adalah suatu upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa pemerintah, negara dan tata nilai dalam kerangka dalam proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradap, yang berwujud diberbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga memiliki makna mennghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jadi dirinya sebagai individu dan masyarakat. Misalnya menghidupkan kembali sifat gotong royong dan tolong menolong.

Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibanya masing-masing realitas kesetaraan dan perbedaanan perbedaan individu. Imi menjadi prinsip pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakt untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu mmbangundiri dan

lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Menurut Oos M. Anwas (2014:50) ada 4 indikator pemberdayaan yaitu :

1. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas Pemberdayaan juga

menekankan pada proses bukan semata-mata pada hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut. "Pemberdayaan bukan berbentuk supermen, tetapi dalam pemberdayaan perlu membentuk Super Tim". Keberdayaan dalam masyarakat kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Menurut Haryono Suyono (dalam Oos M. Anwas 2014:51).

Menurut Kartasamita (dalam hikmat kinawati, 2010:62) upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu mengendalikan kehidupan sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Sulistiyani (2014:83-84) pemberdayaan memiliki beberapa tahapan untuk dilalui :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku

menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merata membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan. Agar terbuka wawasan dan perubahan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- c. Tahap keterampilan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan keterampilan mandiri.

Menurut Haryono Suyono (dalam Oos m. Anwas 2014:51) pakar pemberdayaan mengatakan bahwa Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah membuat suatu lebih berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Konsep Pemuda

Pemuda adalah kelompok masyarakat yang mulai mencari jati dirinya, oleh karena itu manusia muda memerlukan pembinaan dan pengembangan potensi dalam dirinya agar menuju kearah yang lebih baik dan membawa bangsanya kedalam arah yang lebih positif. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam proses pembaharuan sangat diperlukan. Kaum muda membawa semangat dan karakter

yang kuat untuk memacu kelompok usia lain terhanyut dalam suasana yang berkobar, semangat diandalkan dengan prestasi keungulan khas dapat diandalkan dalam setiap persaningan.

Menurut Chandra (2011:1) pemuda adalah kaum muda yang harus dilihat sebagai “pribadi” yang sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seseorang manusia, dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas, dengan hak dan peranan serta kewajiban tertentu dengan potensi dan kebutuhan tertentu pula.

Menurut Hill (dalam haditono, 2002;262) istilah pemuda (youth) memperoleh arti yang baru yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Sehingga dapat diartikan bahwa pemuda antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun.

Menurut Mulyana (2011 : 1) mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki seseorang, jika orang tersebut memiliki jiwa suka memerontak, penuh inisiatif, kreatif anti kemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian maka orang tersebut dapat diartikan sebagai pemuda.

Menurut Sudibyo (2003: 17) pemuda adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) yang menghabiskan sebagian besar atau kalau tidak maka semua waktu longgar mereka dalam kegiatan yang sifatnya politis.

Generasi muda atau pemuda adalah penduduk manusia yang berumur 15-35 tahun yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energy, semangat, dan kreatifitas untuk menciptakan pembaharuan. Menurut kurniasi (2008:27)

Menurut muklis (2007:1) pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-

macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Konsep Pembangunan Desa

Istilah “pembangunan” yang biasa digunakan dalam Bahasa Indonesia, dewasa ini semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung kerancuan pengertian. Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: development, growth, and change, modernization, atau bahkan juga progress. Menurut Raharjo (dalam Totok Mardikanto 2014:1)

Menurut Riyadi (dalam Totok Mardikanto 2014:2) Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Mardikanto (2014:6) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanan oleh masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang yang

akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha atau pembaharuan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka pembaharuan bangsa. Menurut siagian (2004:13)

Secara istilah "Desa" berasal dari Bahasa Sansekerta *Dhesi* yang berarti "Tanah Kelahiran" Istilah ini telah lahir tahun 1114 ketika nusantara masih dari beberapa kerajaan. Desa adalah pemukiman manusia secara populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa berlokasi didaerah pedesaan.

Secara administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong.. Dalam Bahasa Inggris "Desa" disebut village.

Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan nomina (kata benda) yang berarti :

1. Sekelompok rumah diluar kota merupakan kesatuan kampung; dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)
3. Tempat; tanah; daerah.

Menurut R. Bintarto, (dalam Ani Sri Rahayu 2018:179) desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan lain.

Menurut Rifhi Siddiq, (dalam Ani Sri Rahayu 2018:179) desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kedapatan rendah dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bemata pencaharian dibidang agraris serta mampu beinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakat merupakan basis dan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembagunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasaran, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Menurut kartasasmita (2001; 66) pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintaah terutama dalam memberkan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraan.

Menurut Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan Desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah disatu pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah

mengamati orang alam lingkungannya. Menurut (Sugiyono 2017 :8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Untuk memfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Strategi adalah suatu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam proses pemberdayaan, yaitu (Andrew, 2005:19):

- a. Tahap perumusan, pengkajian mengatasi masalah dengan mengembangkan kawasan wisata danau moat
- b. Tahap penetapan, pengambilan keputusan pembentukan pemuda sadar pariwisata
- c. Tahap pelaksanaan, pelaksanaan proses pemberdayaan melalui pelaksanaan program kerja
- d. Tahap penilaian, mengevaluasi program yang dilakukan dan yang belum dilakukan.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa. (1 orang)
2. Sekretaris Desa. (1 orang)
3. Ketua Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata. (1 orang)
4. Ketua Pemuda Desa. (1 orang)
5. Pemuda desa (1 orang)
6. Masyarakat (1 orang)

Hasil Penelitian

1. Daya

Dalam menjalankan pemerintahan desa setiap pemerintah wajib melakukan pemberdayaan kepada setiap pemuda yang ada guna untuk

membantu pembangunan desa. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah ialah untuk mendapatkan daya, kekuatan kepada para pemuda agar supaya seiring berjalannya waktu mereka bisa mengetahui dinamika yg terjadi. Pemberdayaan pemuda melalui undang-undang nomor 40 tahun 2009 pasal 1 bahwa pemerintah harus memberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta peloporan pemuda. pemerintah mempunyai peran penting dalam melihat situasi dan kondisi para pemuda yang ada didesa.

Menurut informan S.L selaku kepala desa, dengan pendidikan terakhir SMA, usia 51 tahun, mengatakan bahwa: *“secara umum pemerintah sangat menyadari bahwa betapa pentingnya melakukan pemberdayaan kepada pemuda karena pemuda merupakan penerus bangsa untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan dan juga disatu sisi mereka juga pejuang bagi desa guna membantu perkembangan dan pembangunan desa. karena melalui undang-undang yang diamanatkan kepada pemerintah desa harus wajib melakukan pemberdayaan kepada pemuda yang ada disetiap desa. Dan hal yang dilakukan pemerintah desa lesabe adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pemuda seperti sosialisasi miras, narkoba dan pelatihan meubel agar pemuda mendapatkan daya dan kemampuan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sosialisasi dan pelatihan tidak semua yang hadir kebanyakan yang hadir hanya pemuda yang sering terlibat dalam kegiatan desa dan juga pelatihan meubel hanya sebagian yang hadir hanya orang tua. Padahal Pemerintah*

juga melibatkan para pemuda dalam setiap kegiatan desa. saat ini pemerintah sudah membentuk organisasi karang taruna agar lebih mudah cara pemerintah untuk menjangkau setiap pemuda yang ada di desa lesabe tetapi belum berjalan baik karena baru dibentuk bulan februari. Namun disisi lain upaya yang dilakukan pemerintah diatas masih banyak pemuda yang belum menyadari bahwa betapa pentingnya mereka didesa. Masih banyak pemuda yang tidak mau melibatkan diri Dalam setiap kegiatan desa masih banyak pemuda yang bersifat apatis dan masa bodoh terhadap setiap kegiatan desa.

Melihat dengan kutipan wawancara diatas pemerintah telah melakukan usaha untuk pemberdayaan kepada pemuda sesuai dengan amanat undang-undang 40 tahun 2009 tetapi belum berjalan dengan baik . Pemberdayaan yang diberikan pemerintah melalui sosialisasi dan pelatihan tetapi belum berjalan dengan baik yang dilakukan pemerintah karena tekendala dari setiap pemuda yang sedikit terlibat menurut informan diatas.dan juga pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kebanyakan yang hadir adalah orang tua dari sini bisa dilihat Pemerintah harus lebih optimis lagi dalam hal penjangkau terhadap para pemuda yang ada. Karena peran para pemuda sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan.

Kekuatan

Dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan kekuatan atau dukungan kepada pemuda guna untuk membantu pembangunan desa. Pemuda juga harus memiliki kekuatan atau kemampuan dan

peran aktif dalam membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Informan T.H, selaku Tokoh Agama, dengan pendidikan terakhir SD, usia 37 tahun. Keikutsertaan pemuda dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah memang ada melalui sosialisasi dan kegiatan-kegiatan desa pemuda selalu dilibatkan agar supaya para pemuda memiliki kekuatan atau kemampuan dalam membantu pembangunan desa tetapi tidak semua yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut dikarenakan pemerintah seringkali hanya focus kepada pemuda yang dekat dengan mereka atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga pemuda lain merasa minder dan lebih memilih untuk jarang melibatkan diri. Dan juga dana untuk pemberdayaan pemuda tidak semua yang tau jelas karena pemerintah belum mensosialisasikan kepada pemuda. Peran aktif pemuda sangat dibutuhkan guna untuk menopang jalannya roda pemerintahan. Agar setiap pemuda tahu akan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan.

Penulis melihat upaya yang dilakukan pemerintah melalui informan menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan ikut melibatkan mereka tetapi masih banyak yang belum terlibat karenakan penjangkaun dari pemerintah yang kurang terhadap setiap pemuda yang ada. Dan penulis melihat bahwa pemberdayaan dan pendekatan pemerintah masih kurang terhadap pemuda. mereka lebih menekankan kepada pemuda yang dekat dengan mereka. Ini yang menyebabkan pemuda jarang ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada disetiap desa.

Kemampuan

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik sosialisasi dan pelatihan yaitu untuk memberikan kemampuan atau keterampilan kepada pemuda agar supaya mereka selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Banyak manfaat yang diterima dari pemuda guna untuk mengasa setiap potensi yang ada dari setiap pemuda agar supaya setiap pemuda yang ada harus bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada.

Menurut informan Y.S. dengan pendidikan terakhir SMA, usia 29 tahun, mengatakan bahwa: *“pemberdayaan pemuda sangatlah penting dalam setiap desa, peran pemuda sangat dibutuhkan guna untuk membantu dan menunjang setiap kegiatan yang ada. Karena pemuda merupakan harapan bangsa tentu setiap kegiatan pemuda harus ada. Tetapi sampai saat ini kurangnya penjangkau pemuda dari setiap pemerintah sehingga jarang sekali pemuda melibatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan desa. Pemberdayaan untuk pemuda wajib dilakukan pemerintah guna untuk melihat kemampuan dan mengembangkan setiap potensi atau bakat para pemuda yang ada. Di desa lesabe banyak sekali bakat atau potensi setiap pemuda tetapi pemerintah tidak memberikan dukungan kepada mereka untuk ditindak lanjuti dan hal itu menjadi kendala bagi mereka dan harapan saya selaku pemuda pemerintah untuk lagi pendekatan dengan mereka.*

Berdasarkan apa yang telah dikatakan informan bahwa pemerintah desa lesabe harus melakukan pemberdayaan kepada seluruh pemuda bukan hanya sebagian. Agar supaya setiap pemuda boleh merasakan pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah. Karena pemberdayaan adalah proses pembagunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri.

Menurut data diatas, sudah terlihat bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan terhadap pemuda yaitu tingkat penjangkauan dari pemerintah yang kurang sehingga mengakibatkan para pemuda tidak melibatkan diri. Ditambah lagi dengan keadaan pemuda yang ada didesa yang begitu mementingkan hal-hal yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan membantu pemerintah pemuda lebih memilih masa bodoh untuk setiap kegiatan yang ada.

Sebagaimana sudah ditegaskan dalam undang—undang nomor 40 tahun 2019 pasal 9 dan 13 tentang kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pasal 7 dan 8, pelayanan pemuda diarahkan untuk menumbukan patriotism, dinamikam, budaya prestasi, semangat profesionalisme dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya. Pada pasal 8 disebutkan bahwa srategi pelayan kepemudaan adalah bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemudam, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki. Dan pemberian kesempatan yyang sama untuk berekpresi, beraktifitas da berorganisasi dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan dan penyiapan kader

pemuda dalam menjalankan pemerintahan dan mediasi yang dibutuhkan.

Selain itu esensi pemberdayaan sebagaimana pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang no 40 tahun 2019 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri untuk menuju kemandirian pemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional, penguatan kemandirian ekonomi pemuda dan budaya pemuda dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Besar harapan penulis bahwa pemerintah lebih lagi menjangkau pemuda dan melibatkan semua pemuda jangan ada perbedaan dari setiap pemuda yang ada. Agar semua pemuda bisa berpartisipasi lebih dalam desa. Sangat dibutuhkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah terhadap pemuda didesa agar lebih giat lagi menjangkau pemuda dan program pemerintah adanya untuk pemuda tentang pemberdayaan. Penulis menyarankan untuk pemerintah bahwa begitu banyak potensi yang ada mulai dari perikanan dan pertanian agar pemerintah bisa mengembangkan potensi yang seperti : ikan asin, pembuatan cakalang asap, dan ikan roa yang bisa di perjual belikan untuk menambah pendapatan. Dari pertanian juga bisa pemerintah memfasilitasi untuk pembuatan krepek

Kesimpulan

1. Peran pemerintah desa lesabe belum berjalan secara maksimal karena belum ada program yang menyentuh

langsung ke pemuda untuk pengembangan potensi setiap pemuda yang ada didesa.

2. peran pemerintah desa lesabe dalam fungsi pemberdayaan pemuda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pemuda belum berjalan baik karena keterlibatan pemuda yang kurang.
3. pemberdayaan pemuda yang dilakukan pemerintah sampai saat ini juga tidak berjalan secara maksimal dikarenakan proses penjangkauan dari pemerintah yang hanya melibatkan pemuda sekitar mereka atau pemuda yang dekat dengan pemerintah tanpa menjangkau semua pemuda.
4. Peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda belum terlaksana secara maksimal karena fokus pemerintah dalam APBDES hanya diperuntukan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa, MTK dan LPM.

Saran

1. Peran pemerintah desa lesabe diharapkan harus memberikan program yang langsung menyentuh ke pemuda dalam pengembangan potensi setiap pemuda yang ada didesa.
2. peran pemerintah desa lesabe dalam fungsi pemberdayaan pemuda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pemuda diharapkan dapat mengikutsertakan pemuda dalam setiap kegiatan pembangunan desa.
3. pemberdayaan pemuda yang dilakukan pemerintah diharapkan bisa berjalan dengan baik dan proses penjangkauan dari pemerintah harus melibatkan semua pemuda bukan hanya segelintir

pemuda yang dekat dengan pemerintah saja.

4. Peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda diharapkan dalam pembuatan APBDES dapat memuat anggaran untuk kegiatan pemuda yang dimana dapat dikelola untuk menghasilkan PAD bagi desa lesabe.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos m. 2014. *Pemberdayaan masyarakat Di Era Global*. Jakarta: Alfabeta.
- Creswell, john w. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chandra, Teddy. 2011. Skripsi, *Pemberdayaan Pemuda Pengangguran Melalui Usaha Industry Kecil Kerajinan Sarung Tangan. (study pada Pengrajin Tenung Wanajera Utara KabupatenPemalang, (tidak diterbitkan)*
- Duverger, Maurice. 2010 *Sosiaologi Politik*. Jakarta: Grafindo persada
- Fendri, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pemamfaataan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hikmat, H. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaweru Ulama Press
- Haditono, Siti Rahayu. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjma Mada University Press.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Ani. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Siagian, Pondang. 2014. *Filsafat Administrasi, Cetak Kelima*, Jakarta: Liji Mas Agung.
- Suhardono, Edi. 2018. *Teori Peran konsep, Derivasi dan Implementasinya* Jakarta: Gramedia
- Sulistiyani, S. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Kebudayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Public dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan